



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PASURUAN
TAHUN 2023



JL. PAHLAWAN NO. 22A, PEKUNCEN, KOTA PASURUAN
TELP (0343) 416883

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sesuai mandat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2021 - 2026 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pasuruan. Pada dasarnya LKjIP merupakan gambaran dari hasil - hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pasuruan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun - tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pasuruan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Kota Pasuruan Tahun 2023 ini dapat berm anfaat bagi semua pihak.

Kota Pasuruan,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang



GUSTAP FURWOKO, ST, MT
Pemntina Utama MUda/ IV c
NIP. 19670824 199803 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial yang didukung dengan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial yang diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu Indeks Kualitas Jalan, Indeks Layanan Drainase, Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara dan Indeks Penataan Ruang. Secara umum capaian kinerja organisasi sesuai dengan PK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dalam kategori sangat tinggi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sakip PD di targetkan Nilai 78 terealisasi 78,01 dan capaiannya 100,01% hal ini di karenakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus berinovasi dan berkoordinasi dengan bagian organisasi dan inspektorat perihal pemenuhan dokumen – dokumen kelengkapan sakip, sehingga menghasilkan nilai tinggi untuk DPUPR
2. Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti di targetkan 100% terealisasi 100% sehingga capaiannya 100% hal ini di karenakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melengkapi permintaan kekuarangan yang di keluarkan BPK.
3. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD di targetkan 100% terealisasi 137,76% sehingga nilai capaian 137,76% kategori ini sangat tinggi. Hal ini di karenakan koordinasi yang tepat di setiap bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga merealisasikan kinerja program sesuai jadwal dan tepat waktu.
4. Indeks Kualitas Jalan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,50% dan terealisasi sebesar 76,62% sehingga nilai capaian sebesar 98,57% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya pemeliharaan rutin pada seluruh ruas jalan kota dan jembatan serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah bertambahnya kerusakan jalan dan jembatan dari asumsi pada saat perencanaan. Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan pembangunan fisik serta pemeliharaan rutin jalan, bangunan pelengkap dan jembatan sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia.

5. Indeks Layanan Drainase pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 82,78% dan terealisasi sebesar 77,61% sehingga tingkat capaiannya adalah 94,71% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah survey yang dilaksanakan masih secara manual dengan menggunakan alat ukur meteran roll sehingga tingkat ketelitiannya kurang akurat. Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan pembangunan fisik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia serta melaksanakan survey kondisi dengan menggunakan alat dengan ketelitian cukup akurat berupa GPS RTK Theodolite.
6. Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara pada tahun Dari target tahun 2023 sebesar 61,51% dapat terealisasi sebesar 64,90% sehingga tingkat capaiannya adalah 105,51% dalam kat egori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung oleh penyedia yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya, serta pendanaan pembangunan yang berasal dari beberapa sumber tidak hanya menunggu dari APBD kota juga membantu mendukung tercapainya target RKPD
7. Indeks Penataan Ruang pada tahun tahun 2023 sebesar 74,47% dapat terealisasi sebesar 74,02% sehingga tingkat capaiannya adalah 99,40% dalam kategori sangat tinggi. Masih belum terimplementasikan antara kondisi eksisting dengan rencana pola ruang RTRW (contoh untuk kawasan industri belum tersusunnya Perwali terkait RTBL) Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah mengupayakan pelaksanaan lebih maksimal di tahun selanjutnya, menyusun Perwali RTBL untuk Kawasan Industri Kota Pasuruan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	8
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	8
1.2.2 Anggaran	9
1.2.3 Isu Strategis	10
1.3 Dasar Hukum	11
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	14
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	19
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	54
3.1 Capaian Kinerja	54
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	54
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	54
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	63
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	66
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	67
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	68
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	75

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	78
3.2 Realisasi Anggaran	85
BAB IV PENUTUP.....	90
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Table 1.2.2 Anggaran	9
Table 1.2.3 Pemetaan Isu Strategis	10
Tabel 2.1 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	14
Tabel 2.1 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023	15
Tabel 2.2 1 Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	19
Tabel 2.3 1 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023.....	20
Tabel 2.3 2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023	21
Tabel 2.3 3 Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023	35
Tabel 2.3 4 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023	39
Tabel 2.3 5 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	40
Tabel 3.1 1 Pengkategorian Capaian Kinerja	54
Tabel 3.1 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023	54
Tabel 3.1 3 Perbandingan Capaian Kinerja	64
Tabel 3.1 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	66
Tabel 3.1 5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	67
Tabel 3.1 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	68
Tabel 3.1 7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	76
Tabel 3.1 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	78
Tabel 3.2. 1 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sesuai mandat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan SE Menteri PANRB no 5 tahun 2021, berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Perangkat Daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tahunan perangkat daerah disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan disampaikan kepada Bupati/Walikota/Gubernur paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir serta disampaikan pada Menteri PANRB bersamaan dengan penyampaian LPPD secara daring melalui esr.menpan.go.id yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (result oriented). Selarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjiP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

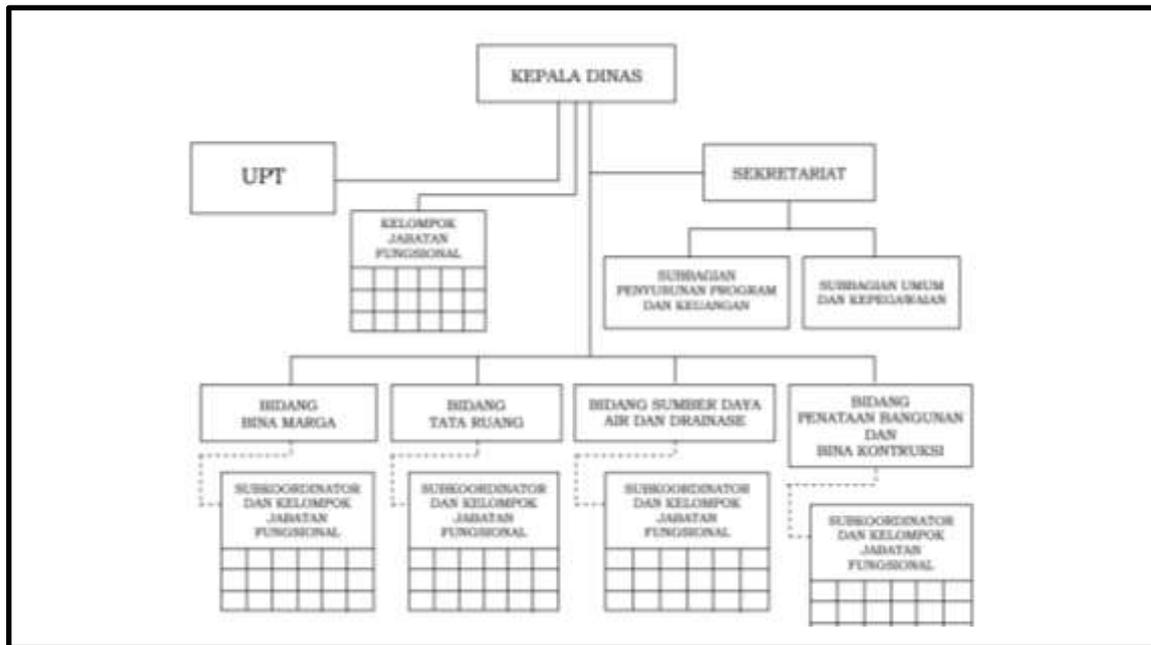
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- f. pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;

- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- h. pembinaan terhadap UPT.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan



Sumber : Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.2.2 Anggaran

Pada Tahun 2022 dan 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersumber dari dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan perbandingan anggaran sebagai berikut:

Tabel 1.2.2 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2022	Rp 40.640.195.566,00
APBD	2023	Rp 61.751.037.605,00
DAK	2022	Rp 4.289.976.500,00
DAK	2023	Rp 24.556.375.381,00

Sumber : Dokumen Perencanaan Perubahan Anggaran DPUPR TA 2022 dan 2023

1.2.3 Isu Strategis

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan 2021-2026, dijelaskan bahwa Isu-isu strategis ditentukan dan didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang juga berpengaruh terhadap tercapainya sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas PD Provinsi Jawa Timur yakni Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Selain itu, isu – isu strategis ini juga didasarkan pada permasalahan yang berdampak pada implementasi RTRW dan KLHS pada pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan.

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat dilakukan perumpunan permasalahan dan ditarik menjadi beberapa isu strategis sebagai berikut:

Table 1.2.3 Pemetaan Isu Strategis

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Masih belum optimalnya rencana tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan ruang	Masih belum optimal dan belum sesuai antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
2	Masih banyaknya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	
3	Tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan infrastruktur yang belum memadai)	Menjamin kondisi infrastruktur pekerjaan umum/perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi
4	Kapasitas saluran drainase menurun	
5	Masih adanya kondisi jalan yang belum mantab	
6	Terbatasnya jumlah bangunan Gedung negara yang berkualitas	
7	Belum terealisasikannya pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara	Menjamin ketersediaan tanah sesuai kebutuhan Dinas PUPR untuk pembangunan sarana dan prasarana umum secara tepat waktu

Salah satu isu strategis yang diangkat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menjamin kondisi infrastruktur pekerjaan umum/perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yang muncul baik pada saluran irigasi dan drainase maupun pada jalan, jembatan serta bangunan gedung. Saat ini masih banyak warga yang sering membuang sampah ke saluran yang dapat mengakibatkan saluran tidak berfungsi dengan baik. Banyak pula pengguna jalan yang mengendarai kendaraan bermuatan tidak sesuai dengan kelas jalan yang mengakibatkan banyak jalan bergelombang. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab untuk menjamin kondisi infrastruktur pekerjaan umum/perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Perjanjian Kinerja Perubahan
- 3 Matrik Renstra 2021-2026

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran merupakan adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Tujuan dan Sasaran berserta Indikator pada Renstra Perangkat Daerah dituangkan pada table dibawa ini:

**Tabel 2.1 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial			Indeks Infrastruktur	72,00%	73,05%	74,35%	75,80%	76,95%
		1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kualitas Jalan	73,28%	73,98%	76,36%	77,75%	79,14%
				Indeks Layanan Drainase	82,14%	82,46%	82,78%	83,10%	83,42%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59,93%	61,51%	63,09%	64,67%	66,25%
			Indeks Penataan Ruang	69,40%	74,47%	84,55%	89,64%	94,75%
		1.2	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	77,51	78	78,3	78,6	80
			Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Periode 2021 – 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tujuan 1 : Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksana)	Nilai	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang	Scoring pada 8 area perubahan	Nilai PMPRB

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Reformasi Birokrasi)		selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah	Reformasi Birokrasi	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	Merupakan Nilai Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP atas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	LHE Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Kota Pasuruan
		Persentase Temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	Merupakan persentase temuan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah : Temuan Anggaran oleh BPK x 100	Tanggapan temuan BPK
			100%	Merupakan persentase ketercapaian pelaksanaan program dukungan terhadap sasaran Perangkat Daerah	Realisasi Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD : Program Dukungan Sasaran SKPD x 100	Data Monev Sekretariat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial ndeks Kualitas Jalan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	%	Indeks Kualitas Jalan dibentuk dari indikator persentase jalan kota dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik dan sedang serta indikator persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	(50% x Indeks kualitas jalan) + (40% x indeks layanan dreainase) + (10% x Indeks penataan ruang)	Jalan dan Bangunan Pelengkap Kondisi Mantap Jembatan kondisi mantap Irigasi Kondisi Baik Drainase Kondisi Baik Kesesuaian pemanfaatan ruang Dokumen ketataruangan yang disusun
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	%	Indeks Kualitas Jalan dibentuk dari indikator persentase jalan kota dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik dan sedang serta indikator persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	70% x %jalanan Kota dan Bangunan Pelengkap dalam Kondisi Baik dan Sedang + 30% x % jembatan dalam kondisi baik dan sedang	1. Hasil Survey Kondisi Jalan dan Jembatan tiap tahun 2. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/237/423.011/2018 tentang Perubahan Atas
		Indeks Layanan Drainase	%	Indeks Layanan Drainase dibentuk dari persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik serta persentase drainase dalam kondisi baik. Indeks layanan drainase memudahkan pemerintah untuk mengukur dan membandingkan dampak dari penggunaan APBD dalam pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan rutin	% Irigasi Kondisi Baik + % Drainase Kondisi Baik : 2	1. Hasil Survey Kondisi Jaringan Irigasi dan Drainase tiap tahun 2. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/279/423.011/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/311/423.011/2019 tentang Penetapan Status Jaringan Irigasi Sumber Daya Air dan Drainase

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				jaringan irigasi dan drainase		
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	%	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara dibentuk dari jumlah Gedung negara dalam kondisi baik dan jumlah Gedung negara yang dibutuhkan. Indeks kualitas bangunan Gedung negara memudahkan pemerintah untuk mengukur dan membandingkan dampak dari penggunaan APBD dalam pembangunan Gedung negara	Gedung Negara dalam Kondisi Baik : Gedung Negara yang Dibutuhkan x 100	1. Survey jumlah gedung negara yang dibutuhkan pada tahun 2020 ditambah proyeksi kebutuhan gedung negara 2. Survey kondisi gedung negara tiap tahun
		Indeks Penataan Ruang	%	Indeks Penataan Ruang dibentuk dari persentase Kawasan yang mempunyai rencana detail dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang. Indeks penataan ruang memudahkan pemerintah untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW serta berapa jumlah rencana detail yang dimiliki oleh Kota Pasuruan	70% x %Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang + 30% x % Kawasan yang mempunyai Rencana Detail	1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasuruan Tahun 2021 - 2041 2. Jumlah Dokumen Ketataruangan yang disusun selama tahun 2022-2026

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Tahun 2023

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Target Tujuan dan Sasaran berserta Indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Tahun 2023 dijelaskan pada table di bawah ini:

Tabel 2.2 1 Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial			Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	79,18
		1.1	Meningkat nya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Jalan	%	77,5
				Indeks Layanan Drainase	%	82,46
				Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	%	61,51
				Indeks Penataan Ruang	%	74,47
		1.2	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	78
				Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	%	100
				Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	%	100

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 1 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	78%
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rata – rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%
2	Meningkatnya Kualitas layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum dan penata ruang	81.95%
		Indeks Layanan Jalan	77.50%
		Indeks Layanan Drainase	82.46%
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	61.51%
		Indeks Penataan Ruang	74.47%

Sumber : Perjanjian Kinerja sebelum perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.422.170.200
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp4.054.990.563
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp4.404.180.534
4. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp4.086.298.300
5. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp1.801.479.500
6. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp39.251.687.790
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp825.835.577
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp918.059.400

9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp976.069.348
10. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Rp151.513.800
11. Program Penatagunaan Tanah	Rp89.909.590

Sumber : Anggaran tahun 2023

Rincian mengenai anggaran berdasarkan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 berdasarkan DPA Perangkat Daerah yang dituangkan pada table di bawah ini:

Tabel 2.3 2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	9 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	14 Laporan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%
a	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Dokumen
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%
A	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit
b	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit
7	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	100 Laporan
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Orang
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Orang
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	87,64

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola	87,64
a	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	13 Unit
b	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang
c	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Penelolan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	87,64%
a	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,988 km
b	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,273 km
c	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	53,9 km
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	99,43%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung yang ditingkatkan Langsung dengan Sungai	99,43%
a	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi	807 m
b	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	10 Unit
c	Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	18191 m
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	86,22%
12	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik	86,22%
a	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12 Dokumen
b	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen
c	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
d	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	4 Unit
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	63,33%
13	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	63,33%
a	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kota dan bangunan pelengkap nya dalam kondisi baik dan sedang	74,36%
		Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	78,87%
14	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	74,36%
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5 Dokumen
b	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	278491 M ²
c	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	0 Dokumen
d	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
e	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	4,74 km
f	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	3,4 km
g	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	78,933 km
h	Pemeliharaan rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	355,500 Jembatan
i	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan	2 Dokumen
j	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	11 Dokumen
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase ketersediaan informasi layanan jasa konstruksi	85%
		Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat keterampilan	82%
15	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang kompeten	82%
a	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 Orang
b	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	80 Orang
16	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	85%
a	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	4 Laporan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
b	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	16 dokumen
c	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	4 Dokumen
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	33,34%
		persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	92,10%
16	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penetapan dokumen RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota secara tepat waktu	100%
a	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen
b	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang - undangan bidang penataan ruang	2 Dokumen
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi untuk Pemanfaatan Ruang	100%
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen
IX	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	33

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
19	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	33
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang disusun	1 Dokumen
X	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase petak tanah yang bersertifikat	43,33%
20	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	43,33%
a	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	500 Dokumen
XI	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah yang dikonsolidasi	2%
21	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan kaji ulang penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	45%
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp35.292.640
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp35.292.640
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.677.671.093
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.585.175.033
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Rp92.496.060
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp13.677.600
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp13.677.600
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp57.757.880
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp4.963.800
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp52.794.080
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp594.894.560
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp336.317.100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 44.821.960
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 18.864.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 19.891.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 175.000.300
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	660.987.804
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	520.408.404
Pengadaan Mebel	Rp37.730.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp102.849.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp523.204.430
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp15.442.600

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp104.357.880
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp403.403.950
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	493.702.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp223.126.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp48.515.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp25.660.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp327.240.370
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp455.088.400
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp270.967.200
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan	Rp99.123.100
Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp84.998.100
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.381.494.700
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp900.855.600
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp2.445.462.300
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp2.035.176.800
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.264.543.500

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rp766.993.800
Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Rp400.819.400
Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Rp2.096.730.300
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp11.414.658.300
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rp320.264.200
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.517.931.300
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Rp51.062.000
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.525.400.800
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.479.589.540
Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp8.047.083.540
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp46.291.030.019
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp544.038.600
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Rp27.826.187.640
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp188.694.640
Rekonstruksi Jalan	Rp6.132.180.400
Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp7.274.132.439

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp2.458.307.320
Pemeliharaan rutin Jembatan	Rp896.051.640
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp57.631.540
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp913.805.800
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp271.009.300
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp215.919.700
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Rp55.089.600
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.020.053.220
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp29.327.360
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp41.047.700
Penyusunan Data dan Informasi	Rp949.678.160
Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp215.070.300
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penata Ruang	Rp131.287.000
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Rp83.783.300
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp457.687.600
Koordinasi dan Sinkronisasi	Rp99.438.800
Penertiban dan Penegakan Hukum	
Bidang Penataan Ruang	
Koordinasi Pelaksanaan penataan Ruang	Rp358.248.800

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp511.477.360
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp511.477.360
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp81.883.340
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp81.883.340
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp65.892.500
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Rp65.892.500
Total	Rp 86.307.412.986

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Pada bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Selain itu pada saat penyusunan Dokumen Renstra tahun 2021-2026 terdapat kesalahan administrasi pada saat penentuan IKU yaitu:

1. Kesalahan dalam indikator tujuan, dimana indikator Indeks Infrastruktur merupakan Indikator Kepala Daerah yang dalam hal ini kewenangan Bappelitbangda. Seharusnya indikator tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. IKU tidak memperhitungkan indikator kinerja terkait kegiatan kesekretariatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berkoordinasi dengan Bappelitbangda untuk mengajukan permohonan penyusunan revidi Dokumen Renstra tahun 2021 – 2023 di tahun 2023. Sehingga Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana uraian target kinerja berikut

Tabel 2.3 3 Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sasaran 1 : Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	Merupakan Nilai Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP atas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	LHE Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Kota Pasuruan
		Persentase Temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	Merupakan persentase temuan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah : Temuan Anggaran oleh BPK x 100	Tanggapan temuan BPK

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial ndeks Kualitas Jalan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	%	Indeks Kualitas Jalan dibentuk dari indikator persentase jalan kota dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik dan sedang serta indikator persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	(50% x Indeks kualitas jalan) + (40% x indeks layanan dreainase) + (10% x Indeks penataan ruang)	Jalan dan Bangunan Pelengkap Kondisi Mantap Jembatan kondisi mantap Irigasi Kondisi Baik Drainase Kondisi Baik Kesesuaian pemanfaatan ruang Dokumen ketataruangan yang disusun
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	%	Indeks Kualitas Jalan dibentuk dari indikator persentase jalan kota dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik dan sedang serta indikator persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	70% x %jalanan Kota dan Bangunan Pelengkap dalam Kondisi Baik dan Sedang + 30% x % jembatan dalam kondisi baik dan sedang	1. Hasil Survey Kondisi Jalan dan Jembatan tiap tahun 2. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/237/423.011/2018 tentang Perubahan Atas
		Indeks Layanan Drainase	%	Indeks Layanan Drainase dibentuk dari persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik serta persentase drainase dalam kondisi baik. Indeks layanan drainase memudahkan pemerintah untuk mengukur dan membandingkan dampak dari penggunaan APBD dalam pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan rutin	% Irigasi Kondisi Baik + % Drainase Kondisi Baik : 2	1. Hasil Survey Kondisi Jaringan Irigasi dan Drainase tiap tahun 2. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/279/423.011/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/311/423.011/2019 tentang Penetapan Status Jaringan Irigasi Sumber Daya Air dan Drainase

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				jaringan irigasi dan drainase		
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	%	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara dibentuk dari jumlah Gedung negara dalam kondisi baik dan jumlah Gedung negara yang dibutuhkan. Indeks kualitas bangunan Gedung negara memudahkan pemerintah untuk mengukur dan membandingkan dampak dari penggunaan APBD dalam pembangunan Gedung negara	Gedung Negara dalam Kondisi Baik : Gedung Negara yang Dibutuhkan x 100	1. Survey jumlah gedung negara yang dibutuhkan pada tahun 2020 ditambah proyeksi kebutuhan gedung negara 2. Survey kondisi gedung negara tiap tahun
		Indeks Penataan Ruang	%	Indeks Penataan Ruang dibentuk dari persentase Kawasan yang mempunyai rencana detail dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang. Indeks penataan ruang memudahkan pemerintah untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW serta berapa jumlah rencana detail yang dimiliki oleh Kota Pasuruan	70% x %Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang + 30% x % Kawasan yang mempunyai Rencana Detail	1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasuruan Tahun 2021 - 2041 2. Jumlah Dokumen Ketataruangan yang disusun selama tahun 2022-2026
	Sasaran 2 : Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	Merupakan Nilai Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP atas implementasi	Nilai SAKIP PD	LHE Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Kota Pasuruan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				SAKIP di Perangkat Daerah		
		Persentase Temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	Merupakan persentase temuan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan APEP tahun berjalan yang ditindak lanjuti + Jumlah Temuan hasil pengawas tahun berjalan yang di TL : Jumlah Temuan Hasil pemeriksaan APEP tahun berjalan + Jumlah Temuan hasil pengawas APIP tahun berjalan x 100	Tanggapan temuan BPK

Sumber : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Tabel 2.3 4 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79,18%
		Indeks Kualitas Jalan	77,50%
		Indeks Layanan Drainase	82,46%
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	61,51%
		Indeks Penataan Ruang	74,47%
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP PD	78
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Anggaran

Rp8.203.079.873

Rp4.041.110.563

Rp4.375.680.534

4. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp4.661.214.300
5. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp1.801.479.500
6. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp19.805.407.410
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp629.837.748
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp720.959.400
9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp487.979.348
10. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Rp151.513.800
11. Program Penatagunaan Tanah	Rp51.909.590

Dengan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3 5 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	9 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/Bulan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	14 Laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%
a	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Dokumen
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%
A	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
b	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	96 Dokumen
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit
b	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit
7	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	100 Laporan
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Orang
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	87,64
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola	87,64
a	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	13 Unit
b	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang
c	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Penelolan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	87,64%
a	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,988 km
b	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,273 km
c	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	53,9 km
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi	99,43%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung yang ditingkatkan Langsung dengan Sungai	99,43%
a	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi	807 m
b	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	8 Unit
c	Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	18191 m
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	86,22%
12	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Negara Kondisi Baik	86,22%
a	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12 Dokumen
b	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan	3 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
c	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen
d	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	5 Unit
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	63,33%
13	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	63,33%
a	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapanya dalam kondisi baik dan sedang	74,36%
		Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	78,87%
14	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	74,36%
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
b	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	278491 M ²
c	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	0 Dokumen
d	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen
e	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	4,74 km
f	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	3,4 km
g	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	78,933 km
h	Pemeliharaan rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	355,500 m
i	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan	2 Dokumen
j	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	11 Dokumen
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase ketersediaan informasi layanan jasa konstruksi	85%
		Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat keterampilan	82%
15	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang kompeten	82%
a	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 Orang
b	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	80 Orang

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	85%
a	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	4 Laporan
b	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	16 dokumen
c	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	4 Dokumen
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	33,34%
		persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	92,10%
16	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penetapan dokumen RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota secara tepat waktu	100%
a	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen
b	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang - undangan bidang penataan ruang	2 Dokumen
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi untuk Pemanfaatan Ruang	100%
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen
IX	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	33
19	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	33
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang disusun	2 Dokumen
X	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase petak tanah yang bersertifikat	43,33%
20	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	43,33%
a	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	500 Dokumen
XI	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah yang dikonsolidasi	2%
21	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan kaji ulang penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	45%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023
(setelah perubahan)

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp35.292.640
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp35.292.640
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.546.807.003
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.454.310.943
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Rp92.496.060
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp13.677.600
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp13.677.600
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp37.757.880
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp4.963.800
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp32.794.080
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp606.964.560
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp 336.317.100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp44.821.960
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp18.864.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp19.891.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp187.070.300

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	571.685.800
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp468.836.400
Pengadaan Mebel	Rp0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp102.849.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp511.206.321
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp15.442.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp92.359.771
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp403.403.950
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp663.702.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp223.126.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp48.515.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp25.660.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp366.401.100
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp455.0 88.400
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp270.967.200
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan	Rp99.123.100
Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp84.998.100
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya	Rp4.507.544.000

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp659.775.600
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp1.865.558.300
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp1.982.210.100
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.816.187.100
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rp600.593.800
Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Rp136.819.400
Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Rp2.078.773.900
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp11.061.636.800
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rp320.264.200
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.468.091.300
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Rp51.062.000
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.222.219.300
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.047.083.540
Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp8.047.083.540
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp45.250.407.519
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan	Rp619.038.600

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis	
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Rp27.678.937.640
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp188.694.640
Rekonstruksi Jalan	Rp6.132.180.400
Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp7.489.132.439
Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp2.532.569.820
Pemeliharaan rutin Jembatan	Rp896.051.640
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp57.631.540
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp743.805.800
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil	Rp164.377.800
Konstruksi	
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp120.488.200
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Rp43.889.600
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Rp1.040.172.020
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp29.327.360
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp41.047.700
Penyusunan Data dan Informasi	Rp969.796.960
Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp190.570.300
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penata Ruang	Rp116.287.000
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Rp74.283.300
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp259.638.100

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Koordinasi dan Sinkronisasi	Rp99.438.800
Penertiban dan Penegakan Hukum	
Bidang Penataan Ruang	
Koordinasi Pelaksanaan penataan Ruang	Rp160.199.300
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp426.477.360
Koordinasi dan Sinkronisasi	Rp426.477.360
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp81.883.340
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp81.883.340
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp65.892.500
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Rp65.892.500
Total	Rp 82.779.799.483

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	77.50%	76.62%	98.87%	Sangat Tinggi	Bidang Bina Marga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indeks Layanan Drainase	82.46%	79.01%	95.82%	Sangat Tinggi	Bidang SDAD
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	61.51%	64.90%	105.51%	Sangat Tinggi	Bidang PBBK
		Indeks Penataan Ruang	74.47%	74,02%	94,40%	Sangat Tinggi	Bidang Tata Ruang
	Meningkatnya Sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai Sakip PD	78	78,01	100,01	Sangat Tinggi	Sekretariat
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat
		Persentase rata – rata ketercapaian pelaksanaan program	100%	115,49%	115,49%	Sangat Tinggi	Sekretariat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dukungan sasaran SKPD					

Sumber : Perhitungan IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial yang diukur dengan 4 (empat) indikator yang menggambarkan peran dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Indikator – indikator tersebut yaitu:

1. Indeks Kualitas Jalan

Indeks Kualitas Jalan diukur berdasarkan data persentase jalan kota dan bangunan pelengkapanya dalam kondisi baik dan sedang dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang dengan masing – masing pembobotan 70% dan 30%. Panjang jalan kota dan bangunan pelengkapanya dalam kondisi baik dan sedang serta jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang diperoleh dari hasil survey yang mulai dilakukan pada pertengahan tahun berjalan. Survey ini dilaksanakan oleh pihak ke tiga. Pada tahun 2023, pemilihan penyedia dilaksanakan dengan menggunakan metode pemilihan Pengadaan Langsung. Survey kondisi jalan dilaksanakan oleh PT. ARDI DARMA ENGINEERING dengan nomor kontrak 600.1.8/992/423.108/2023 dan survey kondisi jembatan dilaksanakan oleh CV. HIRFI STUDIO dengan nomor kontrak 000.3.2/1758/423.108/2023.

Survey Kondisi Jalan atau *Road Condition Survei* (RCS) menggunakan metode penilaian *Surface Distress Index* (SDI) yang merupakan metode penilaian perkerasan berdasarkan skala kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan yang terjadi di lapangan. Terdapat 4 (empat) variable penialian SDI yaitu:

b. *Total Area of Cracks* (Luas retakan) dengan skala penilaian sebagai berikut:

- NONE
- < 10% SDI = 5
- 10% – 30% SDI = 20
- > 30% SDI = 40

- c. *Average Crack Widths* (Lebar retakan) dengan skala penilaian sebagai berikut:
- NONE
 - FINE < 1 mm
 - MED 1 – 3 mm
 - WIDE > 3 mm SDI = SDI * 2
- d. *Total Number of Potholes* (Jumlah lubang) dengan skala penilaian sebagai berikut:
- NONE
 - < 10 / Km SDI = SDI + 15
 - 10 – 50 / Km..... SDI = SDI + 75
 - > 50 / Km SDI = SDI + 225
- e. *Average Depth of Wheel Rutting* (Kedalaman bekas roda) dengan skala penilaian sebagai berikut:
- NONE
 - < 1 Cm X = 0.5..... SDI = SDI + 5 * X
 - 1 – 3 Cm..... X = 2 SDI = SDI + 5 * X
 - > 3 CmX = 5 SDI = SDI + 20

Total nilai SDI yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengamatan lapangan kemudian dijadikan sebagai dasar penentuan kondisi jalan dengan penilaian sebagai table berikut ini:

KONDISI JALAN	SDI
Baik	< 50
Sedang	50 - 100
Rusak Ringan	100 - 150
Rusak Berat	> 150

Sumber: Bina Marga, 2011

Bridge Management System (BMS) merupakan sistem manajemen jembatan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga yang berfungsi sebagai pembuat rencana kegiatan jembatan, pelaksanaan dan pemantauan. Pada pemeriksaan dan penilaian kondisi elemen jembatan menurut BMS terbagi dalam 5 (lima) level, kelima level ini terbagi sesuai dengan kode dan evaluasi elemen kerusakannya. Untuk sistem penilaian tingkat kerusakan yang terjadi dan keberfungsian daripada elemen jembatan dinilai dengan melihat struktur, kerusakan, kuantitas, fungsi, dan pengaruh. Penilaian pada struktur untuk kondisi

berbahaya dengan nilai kondisi 1 dan untuk kondisi tidak berbahaya dengan nilai 0. Pada kerusakan parah diperoleh dengan nilai 1, sedangkan kondisi tidak parah dengan nilai 0. Untuk kuantitas yang lebih dari 50% dengan nilai kondisi 1 dan untuk kuantitas kurang dari 50% dengan nilai kondisi 0. Nilai kondisi di dapatkan dengan menambah nilai kondisi pada struktur, kerusakan, kuantitas, fungsi dan pengaruh. Untuk usulan penanganan jembatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Kriteria	Nilai	Katagori	Usulan penganan
Kondisi	0 – 2	Baik	Pemeliharaan rutin dan berkala
	3	Sedang	Rehabilitasi
	4 atau 5	Buruk	Penggantian

Sumber: Anonim 1993

Panjang Jalan Kota Terbangun di Kota Pasuruan sepanjang 78,933 Km sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/237/423.011/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/182/423.011/2018 tentang Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Pasuruan. Dari hasil survey lapangan diperoleh panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang sepanjang 66,92 Km (84,78%) dan panjang bangunan pelengkapanya dalam kondisi baik dan sedang sepanjang 34,450 Km dari total panjang bangunan pelengkap jalan sepanjang 64,089 Km (53,75%). Dari total 58 buah jembatan di Kota Pasuruan terdapat 46 jembatan dalam kondisi baik dan sedang (79,71%). Sehingga nilai Indeks Kualitas Jalan diperoleh dari perhitungan berikut:

Nilai akhir Indek Kualitas Jalan Tahun 2023 = 70% x persentase jalan kota dan bangunan pelengkapanya dalam kondisi baik dan sedang + 30% x jembatan dalam kondisi baik dan sedang

Nilai akhir Indek Kualitas Jalan Tahun 2023 = 70% x 52,83% + 30% x 23,79%

Nilai akhir Indek Kualitas Jalan Tahun 2023 = 76,62%

Dari target tahun 2023 sebesar 77,50% dapat terealisasi sebesar 76,62% sehingga tingkat capaiannya adalah 98,87% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya pemeliharaan rutin pada seluruh ruas jalan kota dan jembatan serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Hambatan yang ditemui

dalam pencapaian indikator ini adalah bertambahnya kerusakan jalan dan jembatan dari asumsi pada saat perencanaan.

Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan pembangunan fisik serta pemeliharaan rutin jalan, bangunan pelengkap dan jembatan sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia.

2. Indeks Layanan Drainase

Indeks Layanan Drainase dihitung berdasarkan data panjang irigasi kondisi baik dan panjang drainase kondisi baik. Nilai – nilai tersebut diperoleh dari hasil survey lapangan yang dilaksanakan oleh petugas survey lapangan Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PUPR Kota Pasuruan. Survey dilaksanakan dalam periode satu tahun secara bertahap. Survey ini dilakukan menggunakan alat ukur manual.

Penilaian hasil survey didasarkan pada kondisi kerusakan fisik di lapangan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Baik jika kondisi saluran > 90% atau tingkat kerusakan < 10% dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin
- Rusak ringan jika kondisi saluran 80% - 90% atau tingkat kerusakan 10% – 20 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan berkala
- Rusak sedang jika kondisi saluran 60% - 80%, atau tingkat kerusakan 21% - 40% dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan
- Rusak berat jika kondisi saluran < 60% atau tingkat kerusakan > 40% kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan berat atau penggantian

Panjang total irigasi di Kota Pasuruan adalah 18.191m sedangkan panjang Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/279/423.011/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/311/423.011/2019 Tentang Penerapan Status Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase. Berdasarkan hasil survey diperoleh panjang irigasi kondisi baik 42.732 m (79,29%) dan panjang drainase kondisi baik 18.055m (78,73%). Sehingga nilai akhir indeks layanan drainase tahun 2023 adalah:

$$\text{Indeks Layanan Drainase tahun 2023} = \frac{\% \text{Irigasi Kondisi Baik} + \% \text{Drainase Kondisi Baik}}{2}$$

$$\text{Indeks Layanan Drainase tahun 2023} = \frac{50\% \times 79,29\% + 50\% \times 78,73\%}{2}$$

Indeks Layanan Drainase tahun 2023 = 79,01%

Dari target tahun 2023 sebesar 82,46% dapat terealisasi sebesar 79,01% sehingga tingkat capaiannya adalah 95,82% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah survey yang dilaksanakan masih secara manual dengan menggunakan alat ukur meteran roll sehingga tingkat ketelitiannya kurang akurat.

Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan pembangunan fisik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia serta melaksanakan survey kondisi dengan menggunakan alat dengan ketelitian cukup akurat berupa GPS RTK Theodolite.

3. Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara

Indikator Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara diukur berdasarkan jumlah Gedung Negara kondisi baik dibandingkan dengan jumlah Gedung negara yang dibutuhkan. Data – data pendukung tercapainya indikator ini berasal dari hasil survey. Pada tahun 2021 dilakukan survey pada gedung negara di Kota Pasuruan meliputi fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan, fasilitas perdagangan serta gedung-gedung Organisasi Perangkat Daerah sebagai data dasar jumlah gedung negara kondisi baik sebanyak 513 gedung negara. Pengukuran dilakukan pada masing – masing komponen struktur gedung (pondasi, struktur, atas, plafond, dinding, lantai, utilitas dan finishing). Sesuai dengan peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik Indonesia nomor 22/PRT/M2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Kerusakan dimaksud dapat dikategorikan menjadi:

- Kerusakan Ringan

Kerusakan yang terjadi pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit langit, penutup lantai dan dinding pengisi

- Kerusakan Sedang
Kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain sebagainya
 - Kerusakan Berat
Kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya
- Penentuan tingkat kerusakan bangunan gedung didasarkan pada tingkat kerusakan pada pekerjaan standar (struktur, arsitektur, ME, finishing)
- a. Rusak ringan $\leq 30\%$
 - b. Rusak sedang $> 30\%$ s.d. 45%
 - c. Rusak berat $> 45\%$

Pada tahun selanjutnya, penambahan jumlah gedung negara dalam kondisi baik berdasarkan jumlah gedung negara yang dilakukan rehabilitasi atau pembangunan pada tahun terkait. Pada tahun 2022 terdapat 529 gedung negara. Pada tahun 2023 penambahan bangunan gedung dalam kondisi baik sebanyak 46 gedung sehingga total bangunan gedung dalam kondisi baik adalah 575 Gedung Negara.

Jumlah kebutuhan bangunan Gedung Negara Kota Pasuruan dihitung berdasarkan pendataan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi terhadap jumlah unit bangunan gedung negara (1 atap = 1 unit gedung) pada masing-masing fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan, fasilitas perdagangan serta gedung-gedung Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menggunakan peta citra satelit. Diperoleh data jumlah gedung negara tersedia sebanyak 738 Gedung Negara. Kemudian dilakukan sampling kebutuhan gedung negara pada masing – masing fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan, fasilitas perdagangan serta gedung-gedung Organisasi Perangkat Daerah dan diperoleh hasil bahwa dibutuhkan penambahan jumlah gedung sebanyak 20% dari total jumlah gedung yang ada sehingga didapatkan kebutuhan gedung negara hingga tahun 2026 sebanyak 886 Gedung Negara. Sehingga nilai akhir indeks kualitas bangunan gedung negara tahun 2023 adalah:

$$\text{Indek kualitas bangunan gedung negara} = \frac{\text{Jumlah Gedung Negara Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Gedung Negara yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

$$\text{Indek kualitas bangunan gedung negara} = \frac{575 \text{ Gedung Negara}}{886 \text{ Gedung Negara}} \times 100\%$$

Indek kualitas bangunan gedung negara = 64,90%

Dari target tahun 2023 sebesar 61,51% dapat terealisasi sebesar 64,90% sehingga tingkat capaiannya adalah 105,51% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bangunan. Dari target tahun 2023 sebesar 61,51% dapat terealisasi sebesar 64,90% sehingga tingkat capaiannya adalah 105,51% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung oleh penyedia yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya, serta pendanaan pembangunan yang berasal dari beberapa sumber tidak hanya menunggu dari APBD kota juga membantu mendukung tercapainya target RKPD

4. Indeks Penataan Ruang

Indeks Penataan Ruang diukur berdasarkan data persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang dan kawasan yang mempunyai rencana detail dengan masing – masing pembobotan 70% dan 30%.

Kesesuaian pemanfaatan ruang diperoleh dari analisa perhitungan data Luas lahan yang tidak bertentangan dengan pola ruang RTRW sebesar 3224,29 Ha dibagi dengan total luas Kota Pasuruan sebesar 3900,07 Ha. Data luasan lahan yang tidak bertentangan dengan pola ruang RTRW tersebut diperoleh melalui proses pengumpulan data primer (survey lapangan) oleh tim internal bidang tata ruang sepanjang tahun 2023.

Kawasan yang mempunyai rencana detail diperoleh dari perhitungan Jumlah dokumen ketataruangan yang dikerjakan pada tahun 2023 sebanyak 7 Dokumen ketataruangan yaitu 1 Dokumen RTRW Kota Pasuruan tahun 2022 – 2041, 4 Dokumen RDTR pada 4 Kecamatan, 1 dokumen Dokumen pemetaan batas administrasi kelurahan 1 Dokumen RTBL dibagi dengan 11 dokumen ketataruangan (1 Dokumen RTRW Kota Pasuruan tahun 2022 – 2041, 4 dokumen RDTR pada 4 Kecamatan dan 6 Dokumen Penataan Ruang). Dokumen RTRW dan RDTR disusun melalui pendampingan oleh Tenaga Ahli Tata Ruang selama tahun 2021 akan tetapi disahkan menjadi Perda RTRW dan Perwali RDTR pada tahun 2022. Sedangkan, dokumen AMDAL disusun oleh pihak ketiga melalui pemilihan Seleksi Jasa Konsultansi. Penyusunan dokumen AMDAL ini dilaksanakan oleh CV. RONA

LESTARI dengan nomor kontrak 000.3.3/817/423.108/AMDAL/TR1/2023 tanggal 3 April 2023

Sehingga nilai Indeks Penataan Ruang diperoleh dari perhitungan berikut:

• $(70\% \times \% \text{Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang}) + (30\% \times \% \text{Kawasan yang Mempunyai Rencana Detail})$

$= \{70\% \times \%(\text{luas lahan yang sesuai pola ruang RTRW} / \text{luas kota pasuruan})\} + \{30\% \times \%(\text{jumlah dokumen ketataruangan yang dikerjakan pada thn tersebut} / \text{jumlah dokumen ketataruangan selama 5 tahun})\}$

$= \{70\% \times \% (3224,29 \text{ Ha} / 3900,07 \text{ Ha})\} + \{30\% \times \% (7 \text{ dokumen} / 13 \text{ dokumen})\}$

$= (70\% \times 53,85\%) + (30\% \times 53,85\%)$

$= 74,02\%$

Nilai akhir Indeks Penataan Ruang Tahun 2023 = $70\% \times$ persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang + $30\% \times$ persentase Kawasan yang Mempunyai Rencana Detail

Nilai akhir Indeks Penataan Ruang Tahun 2023 = $70\% \times 57,87\% + 30\% \times 16,15\%$

Nilai akhir Indeks Penataan Ruang Tahun 2023 = $74,02\%$

Dari target tahun 2023 sebesar $74,47\%$ dapat terealisasi sebesar $74,02\%$ sehingga tingkat capaiannya adalah $99,40\%$ dalam kategori sangat tinggi. Hal ini masih belum terimplementasikan antara kondisi eksisting dengan rencana pola ruang RTRW (contoh untuk kawasan industri belum tersusunnya Perwali terkait RTBL)

Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah mengupayakan pelaksanaan lebih maksimal di tahun selanjutnya.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur PUPR	Belum menjadi indikator kinerja	74,81%	78,06%	81,95%	77,32%	94,35%
	Sasaran: Meningkat nya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	Belum menjadi indikator kinerja	71.31%	73.22%	77,50%	76,62%	98,87%
		Indeks Layanan Drainase	Belum menjadi indikator kinerja	81.83%	82.07%	82,46%	79,01%	95,82%
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	Belum menjadi indikator kinerja	57.90%	59.71%	61,51%	64,90%	105,51%
		Indeks Penataan Ruang	Belum menjadi indikator kinerja	64.33%	64.33%	74,47%	76,96%	103,35%
	Sasaran : Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	Belum menjadi indikator kinerja	Belum menjadi indikator kinerja	77.51%	78	78,01	100,01%
		Persentase temuan anggaran yang di tindak lanjuti	Belum menjadi indikator kinerja	Belum menjadi indikator kinerja	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase rata – rata ketercapaian pelaksana program dukungan sasaran SKPD	Belum menjadi indikator kinerja	Belum menjadi indikator kinerja	100%	100%	137,76%	137,76%

Sumber : Monev Tribulan IV Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penjelasan dari tabel di atas adalah yang pertama Indeks Infrastruktur PUPR mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya 2022 capaian kinerja terealisasi sebesar 78,06% tahun 2023 sebesar 77,32%, pada tahun ini mengalami penurunan, di karenakan ada beberapa indeks yang tidak bisa mencapai target sehingga mempengaruhi jumlah realisasi indeks infrastruktur PUPR. Indeks Kualitas Jalan di tahun 2022 capaian kinerja realisasi 73,22%, tahun 2023 realisasi sebesar 76,62%, pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 3,4% hal ini di karenakan terlaksananya pemeliharaan rutin pada seluruh ruas jalan kota dan jembatan serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Indeks layanan drainase pada tahun 2022 capaian kinerja terealisasi 82,07%, pada tahun 2023 realisasi sebesar 79,01% pada tahun ini mengalami penurunan 3,06% hal ini di karenakan survey yang dilaksanakan masih secara manual dengan menggunakan alat ukur meteran roll sehingga tingkat ketelitiannya kurang akurat. Indeks kualitas bangunan gedung negara pada tahun 2022 capaian kinerja terealisasi sebesar 59,71% dan tahun 2023 terealisasi 64,90%, pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 5,19%, hal ini di karenakan terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung oleh penyedia yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya. Indeks Penataan ruang pada tahun 2022 capaian kinerja terealisasi 64,33% sedangkan pada tahun 2023 terealisasi 76,96%, hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di karenakan terealisasinya Kawasan yang mempunyai rencana detail diperoleh dari perhitungan Jumlah dokumen ketataruangan yang dikerjakan pada tahun 2023 sebanyak 7 Dokumen

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur PUPR	77,32%	82,25%	94,00%
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	76,62%	83,62%	91,62%
		Indeks Layanan Drainase	79,01%	83,42%	94,71%
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	64,90%	66,25%	97,96%
		Indeks Penataan Ruang	76,96%	94,75%	81,22%

Sumber : *Monev Tribulan IV Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan*

Uraian penjelasan tabel:

Semua tingkat kemajuan capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mencapai lebih dari 90%. Secara umum hal ini dikarenakan tertibnya administrasi serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk menganalisis kemajuan kinerja pada tahun berikutnya maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan evaluasi dan menekankan pada setiap bidang untuk merencanakan dan penekanan kinerja lebih maju dari pada tahun sebelumnya. Indeks Kualitas Jalan rencana aksi tahun berikutnya adalah Diusulkan kembali penetapan lokasi yang disahkan oleh Gubernur Jawa Timur mengenai JLU. Indeks Layanan Drainase rencana aksi berikutnya Mengupayakan pelaksanaan paket pekerjaan fisik lebih maksimal pada Rehabilitasi Saluran Drainase di tahun selanjutnya dan Merencanakan Pengadaan Trashboom di tahun selanjutnya untuk Sub Kegiatan

Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan. Indeks Bangunan Gedung Negara untuk rencana aksi selanjutnya adalah melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi prasarana bangunan dan lingkungannya lebih banyak di tahun selanjutnya. Indeks Penataan Ruang rencana aksi berikutnya adalah lebih detail menyusun Perwali RTBL untuk Kawasan Industri Kota Pasuruan.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur PUPR	77,32%	-	
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	73.22%	-	
		Indeks Layanan Drainase	82.07%	-	
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59.71%	-	
		Indeks Penataan Ruang	86.25%	-	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disajikan pula perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan Standar

Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain. Namun pada LKjIP Dinas PUPR 2023 tidak dapat menyajikan hal tersebut. Hal ini dikarenakan sesuai dengan penjelasan pada Bab II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari, dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Kedua SPM tersebut bukan merupakan kewenangan dari Dinas PUPR Kota Pasuruan melainkan menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

Namun, pencapaian panjang jalan dalam kondisi mantab di Kota Pasuruan dapat dibandingkan dengan panjang jalan kondisi mantab pada tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2022 panjang jalan dalam kondisi mantab di Kota Pasuruan sebesar 83,62%. Pencapaian ini lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi mantab jalan Provinsi dan jalan Nasional. Sesuai data yang bersumber dari website <https://data.pu.go.id>. Namun data yang tertera pada website ini hanya data jalan kondisi mantab tahun 2021. Jalan Nasional kondisi mantab tahun 2021 sebesar 91,80% dan Jalan Provinsi Jawa Timur kondisi mantab tahun 2021 sebesar 93,60%

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang	Indeks Infrastruktur PUPR	81,95 %	77,32%	94,35%	Faktor penghambat : ada beberapa indeks yang tidak bisa mencapai target sehingga mempengaruhi	lebih memaksimalkan kinerja di tahun berikutnya dan berkoordinasi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	aktivitas ekonomi dan sosial					jumlah realisasi indeks infrastruktur PUPR	lebih terhadap pemangku indeks. Namun Untuk menganalisis kemajuan kinerja pada tahun berikutnya maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan evaluasi dan menekankan pada setiap bidang untuk merencanakan dan penekanan kinerja lebih maju dari pada tahun sebelumnya. Indeks Kualitas Jalan rencana aksi tahun berikutnya adalah Diusulkan kembali penetapan lokasi yang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							disahkan oleh Gubernur Jawa Timur mengenai JLU. Indeks Layanan Drainase rencana aksi berikutnya Mengupayakan pelaksanaan paket pekerjaan fisik lebih maksimal pada Rehabilitasi Saluran Drainase di tahun selanjutnya dan Merencanakan Pengadaan Trashboom di tahun selanjutnya untuk Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan. Indeks Bangunan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Gedung Negara untuk rencana aksi selanjutnya adalah melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi prasarana bangunan dan lingkungannya lebih banyak di tahun selanjutnya. Indeks Penataan Ruang rencana aksi berikutnya adalah lebih detail menyusun Perwali RTBL untuk Kawasan Industri Kota Pasuruan.
	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang	Indeks Kualitas Jalan	77,50%	76,62%	98,87%	Faktor penghambat: bertambahnya kerusakan jalan dan jembatan dari asumsi pada	Memaksimalkan pembangunan fisik serta pemeliharaan rutin jalan,

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	aktivitas ekonomi dan sosial					saat perencanaan	bangunan pelengkap dan jembatan sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia
		Indeks Layanan Drainase	82,46%	79,01%	95,82%	Faktor penghambat: survey yang dilaksanakan masih secara manual dengan menggunakan alat ukur meteran roll sehingga tingkat ketelitiannya kurang akurat	Memaksimalkan pembangunan fisik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia serta melaksanakan survey kondisi dengan menggunakan alat dengan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							ketelitian cukup akurat berupa GPS RTK Theodolite
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	61,51%	64,90%	105,51%	Faktor pendukung: terlaksanya pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten	
		Indeks Penataan Ruang	74,47%	74,02%	99,40%	Faktor penghambat: adanya perubahan regulasi pada masa transisi pelaksanaan Perda RTRW dan Perwali RDTR sehingga butuh banyak penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan penataan ruang	Memaksimalkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia
	Sasaran 2 :	SAKIP	78	78,01	100,01%	Faktor Pendukung :	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima					Sakip PD di targetkan Nilai 78 terealisasi 78,01 dan capaiannya 100,01% hal ini di karenakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus berinovasi dan berkoordinasi dengan bagian organisasi dan inspektorat perihal pemenuhan dokumen – dokumen kelengkapan sakip, sehingga menghasilkan nilai tinggi untuk DPUPR	
		Persentase Temuan Anggaran yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Faktor Pendukung : Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti di targetkan 100% terealisasi 100% sehingga capaiannya 100% hal ini di karenakan Dinas Pekerjaan Umum	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dan Penataan Ruang melengkapi permintaan kekuarangan yang di keluarkan BPK.	
		Persentase rata – rata ketercapaian pelaksanaan Program dukungan sasaran SKPD	100%	115,49%	115,49%	Faktor pendukung : Hal ini di karenakan koordinasi yang tepat di setiap bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga merealisasikan kinerja program sesuai jadwal dan tepat waktu.	

Sumber : Monev Tribulan IV Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian penjelasan tabel:

Pencapaian indikator – indikator sasaran telah melebihi 90%. Capaian indikator ini didukung oleh terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fisik serta kegiatan rutin yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dokumen RTRW yang selama beberapa tahun kebelakang terdapat kendala selama proses pengesahan, pada tahun 2023 berhasil ditetapkan dan serta RDTR sudah terintegrasi dengan aplikasi perizinan *Online Single Submission* (OSS).

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisien si
			Target	Realisa si	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
						(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan: Meningkat kan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruk tur PUPR	81,95%	77,32%	94,35%	74.366.958.779	37.331.235.975	50,19%	0,88% (Efisien si)
	Meningkat nya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Jalan	77,50%	76,62%	98,87%	45.250.407.519	15.309.481.110	33,83%	1,92% (Efisien si)
		Indeks Layanan Drainase	82,46%	79,01%	95,82%	7.778.819.500	7.286.191.719	91,90%	0,02% (Efisien si)
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	61,51%	64,90%	105,51%	20.313.270.160	13.868.643.961	71,65 %	0,55% (Efisien si)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Indeks Penataan Ruang	74,47%	74,02%	99,40%	1.024.461.600	866.919.185	72,41%	0,17% (Efisiensi)
	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	SAKIP	78	78,01	100,01%				
		Persentase Temuan Anggaran yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%				
		Persentase rata – rata ketercapaian pelaksanaan Program dukungan sasaran SKPD	100%	115,49%	115,49%	83.354.052.683	45.339.429.231	54,39%	1,12% (Efisiensi)

Sumber : Monev Tribulan IV Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian penjelasan tabel:

Anggaran pada masing – masing indikator sasaran strategis berasal dari anggaran program pendukung indikator tersebut. Rata-rata SILPA program pendukung sasaran strategis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Jalan didukung oleh program penyelenggaraan jalan dengan Efisien sebesar 1,92% Hal ini dikarenakan pengadaan tanah untuk JLU belum dapat terealisasi dikarenakan DPPT masih dalam proses penyusunan sampai dengan bulan Desember 2023
2. Indeks Layanan Drainase didukung oleh program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan total Efisien sasaran strategis Indeks Layanan Drainase sebesar 0,02. Hal ini Tingkat Kerusakan Saluran Irigasi berdasarkan Hasil Survey Kondisi Tahun 2023 cukup tinggi, sehingga Hasil Paket Pekerjaan fisik TA 2023 belum secara maksimal mencapai target
3. Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan total Efisien sasaran strategis Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara sebesar 0,55%. Hal ini dikarenakan rendahnya harga penawaran paket pekerjaan fisik.
4. Indeks Penataan Ruang didukung oleh Program Penataan Ruang dengan SILPA 0,17. Hal ini dikarenakan masih belum terimplementasikan antara kondisi eksisting dengan rencana pola ruang RTRW (contoh untuk kawasan industri belum tersusunnya Perwali terkait RTBL)

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan: Meningkat kan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota	Indeks Infrastruktur	94,35%					

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	penunjang aktivitas ekonomi dan sosial							
	Meningkat nya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Jalan	98,87%	Program Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik dan sedang	97,68%	Tidak Menunjang	
					Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	88,76%	Tidak Menunjang	
					Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	109,83%	Menunjang	
		Indeks Layanan Drainase	95,82%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	98,28%	Tidak Menunjang	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola	99,26%	Tidak Menunjang	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya	Persentase Pengembangan dan Penelolan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	97,09%	Tidak Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	99,89%	Tidak Menunjang	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung yang ditingkatkan Langsung dengan Sungai	99,82%	Tidak Menunjang	
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	105,51%	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	98,18%	Tidak Menunjang	
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	100%	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Gedung yang terlaksana			
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	100%	Menunjang	
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	100%	Menunjang	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Ketersediaan layanan informasi Layanan Jasa Konstruksi	100%	Menunjang	
					Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat ketrampilan	100%	Menunjang	
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kostruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kostruksi yang dilaksanakan	103,66%	Menunjang	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	93,75%	Tidak Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Indeks Penataan Ruang	99,40%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	190,88%	Menunjang	
					persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	89,76%	Tidak Menunjang	
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penetapan dokumen RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota secara tepat waktu	100,79%	Menunjang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi untuk Pemanfaatan Ruang	125%	Menunjang	
	Sasaran 2 : Meningkatkan Sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP	100,01%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	93,25%	Tidak Menunjang	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR
		Persentase temuan anggaran yang	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang	108,70%	Menunjang	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		ditindak lanjuti		Perangkat Daerah	tersusun tepat waktu			
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan SKPD	115,49%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100,00%	menunjang	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	50,00%	Tidak menunjang	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100,00%	menunjang	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100,00%	menunjang	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR
				Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	61,00%	Tidak menunjang	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	90,98%	Tidak menunjang	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	101,00%	menunjang	Urusan Pertanahan
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	126,27%	menunjang	Urusan Pertanahan
				Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase petak tanah yang bersertifikat	115,39%	menunjang	Urusan Pertanahan
				Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	101,82%	menunjang	Urusan Pertanahan
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah yang dikonsolidasi	231,50%	menunjang	Urusan Pertanahan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan kaji ulang penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	100,00%	menunjang	Urusan Pertanahan

Sumber : Monev Tribulan IV Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian penjelasan tabel:

Pada tahun 2022 Nilai saki, Persentase temuan anggaran yang ditindak lanjuti, Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan SKPD masih belum masuk di dalam IKU eselon 2 , sehingga kita berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Bapelitbangda untuk memasukan 3 indikator dan menjadi penambahan IKU untuk tahun 2023 dan tahun selanjutnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2. 1 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.987.093.904	8.008.193.256	89,11%
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.292.640	29.503.000	83,60%
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.546.807.003	5.789.708.775	88,44%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.677.600	4.485.500	32,79%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.757.880	33.737.270	89,35%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.964.560	516.386.986	85,08%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	571.685.800	452.000.000	79,06%
8	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.206.321	484.474.263	94,77%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	663.702.100	601.397.462	90,61%
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.962.632.400	4.879.224.349	98,32%
11	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	455.088.400	433.444.879	95,24%
12	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1	4.507.544.000	4.445.779.470	98,63%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota			
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.816.187.100	2.406.967.370	99,32%
14	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.816.187.100	2.406.967.370	70,95%
15	Program Penataan Bangunan Gedung	11.061.636.800	7.848.216.834	70,95%
16	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	11.061.636.800	7.848.216.834	70,95%
17	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	8.047.083.540	5.040.389.925	62,64%
18	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	8.047.083.540	5.040.389.925	62,64%
19	Program Penyelenggaraan Jalan	45.250.407.519	15.309.481.110	33,83%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	45.250.407.519	15.309.481.110	33,83%
21	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.204.549.820	980.037.202	81,36%
22	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kostruksi	164.377.800	153.193.400	93,20%
23	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.040.172.020	826.843.802	79,49%
24	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	450.208.400	430.101.020	95,53%
25	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	190.570.300	192.071.220	100,79%
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	259.638.100	243.721.800	93,87%
28	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	426.477.360	349.576.345	81,97%
29	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	426.477.360	349.576.345	81,97%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
30	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	81.883.340	68.285.320	83,39%
31	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	81.883.340	68.285.320	83,39%
32	Program Penatagunaan Tanah	65.892.500	18.956.500	28,77%
33	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	65.892.500	18.956.500	28,77%

Sumber : *Monev Tribulan IV Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Uraian penjelasan tabel:

Secara keseluruhan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 sebesar Rp45.339.429.231,- dari total anggaran Rp83.354.052.683,- sehingga tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 54,39% dengan SILPA sebesar Rp38.014.623.452,- dikarenakan beberapa factor yaitu tingginya sisa harga penawaran, beberapa paket pekerjaan fisik dalam proses pelaksanaan, pengadaan tanah untuk JLU belum dapat terealisasi dikarenakan DPPT masih dalam proses penyusunan, dan monev pengendalian pemanfaatan ruang terdapat lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial yang didukung dengan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial yang diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu Indeks Kualitas Jalan, Indeks Layanan Drainase, Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara dan Indeks Penataan Ruang.

Indeks Kualitas Jalan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,50% dan terealisasi sebesar 76,62% sehingga nilai capaian sebesar 98,87% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya pemeliharaan rutin pada seluruh ruas jalan kota dan jembatan serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah bertambahnya kerusakan jalan dan jembatan dari asumsi pada saat perencanaan. Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan pembangunan fisik serta pemeliharaan rutin jalan, bangunan pelengkap dan jembatan sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia.

Indeks Layanan Drainase pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 81,95% dan terealisasi sebesar 77,32% sehingga tingkat capaiannya adalah 94,35% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah survey yang dilaksanakan masih secara manual dengan menggunakan alat ukur meteran roll sehingga tingkat ketelitiannya kurang akurat. Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan pembangunan fisik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia serta melaksanakan survey kondisi dengan menggunakan alat dengan ketelitian cukup akurat berupa GPS RTK Theodolite.

Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara pada tahun 2023 di targetkan sebesar 61,51% dapat terealisasi sebesar 64,90% sehingga tingkat capaiannya adalah 105,51% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung oleh penyedia yang memiliki keahlian

dan kompetensi di bidangnya, serta pendanaan pembangunan yang berasal dari beberapa sumber tidak hanya menunggu dari APBD kota juga membantu mendukung tercapainya target RKPD

Indeks Penataan Ruang pada tahun tahun 2023 sebesar 74,47% dapat terealisasi sebesar 74,02% sehingga tingkat capaiannya adalah 99,40% dalam kategori sangat tinggi. Masih belum terimplementasikan antara kondisi eksisting dengan rencana pola ruang RTRW (contoh untuk kawasan industri belum tersusunnya Perwali terkait RTBL) Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah mengupayakan pelaksanaan lebih maksimal di tahun selanjutnya, menyusun Perwali RTBL untuk Kawasan Industri Kota Pasuruan.

Kota Pasuruan, Februari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang



GUSTAP PURWOKO, ST, MT
NIP. 19670824 199803 1 005

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUSTAP PURWOKO, ST, MT
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,
WALI KOTA

SAIFULLAH YUSUF

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

GUSTAP PURWOKO, ST, MT
NIP. 196708241998031005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II**

NAMA : GUSTAP PURWOKO, ST, MT
 NIP : 196708241998031005
 PANGKAT / GOL. : PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
 JABATAN / KELAS JABATAN : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG / 14
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		KETERANGAN
			Sebelum	Setelah	
1	Memperbaiki sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	78	78	
2	Memperbaiki sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100	100	
3	Memperbaiki sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan susunan SKPD	100	100	
4	Memperbaiki Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79,18	79,18	
5	Memperbaiki Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Jalan	77,5	77,5	
6	Memperbaiki Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Layanan Drainase	82,46	82,46	
7	Memperbaiki Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	61,51	61,51	
8	Memperbaiki Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Penataan Ruang	74,47	74,47	

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Setelah	
1	PROGRAM PENUNJANG LIGUAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.754.508.107,00	Rp 8.987.000.904,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 9.436.583.100,00	Rp 4.962.652.400,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Rp 3.264.541.500,00	Rp 2.816.187.100,00	

URAIAN					
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp	11.414.638.300,00	Rp	11.061.636.800,00
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp	8.479.599.540,00	Rp	8.047.083.540,00
6	PROGRAM PENTELENGKARAAN JALAN	Rp	46.291.030.019,00	Rp	45.290.407.519,00
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp	1.291.062.530,00	Rp	1.204.549.830,00
8	PROGRAM PENTELENGKARAAN PENATAAN RUANG	Rp	67.279.900,00	Rp	450.208.400,00
9	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp	511.477.360,00	Rp	426.477.360,00
10	PROGRAM PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Rp	81.883.340,00	Rp	81.883.340,00
11	PROGRAM PROGRAM PENATAAN TANAH	Rp	65.892.500,00	Rp	65.892.500,00
JUMLAH		Rp	86.663.986.186,00	Rp	82.779.299.483,00

Mengetahui,
Pejabat Asetan Langsung
WALI KOTA

SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 2 Oktober 2023
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

GUSTAF PURWOKO, ST., MT
NIP. 196708241998031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA : GUSTAP PURWOKO, ST, MT
 NIP : 196708241998031005
 PANGKAT / GOL : PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
 JABATAN / KELAS JABATAN : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG / 14
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BATUAN	OUTPUT / OUTCOME													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JML	
1	Meningkatnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	KAM BAKTI-SKPD	Nilai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Meningkatnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penyediaan layanan informasi yang cepat dan akurat	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Meningkatnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penyediaan layanan informasi yang cepat dan akurat	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Meningkatnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penyediaan layanan informasi yang cepat dan akurat	Indeks	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Meningkatnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penyediaan layanan informasi yang cepat dan akurat	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Meningkatnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penyediaan layanan informasi yang cepat dan akurat	%	82	83	83	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
7	Meningkatnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penyediaan layanan informasi yang cepat dan akurat	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Meningkatnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penyediaan layanan informasi yang cepat dan akurat	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPAIAN OUTPUT																	
% CAPAIAN KINERJA TIAP BILAN																	

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Setelah	
1	Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 8.754.508.107,00	Rp 8.987.093.904,00	
2	Program PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 5.836.583.100,00	Rp 4.962.632.400,00	
3	Program PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 3.264.543.500,00	Rp 2.816.187.100,00	
4	Program PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEJUNG	Rp 11.414.658.300,00	Rp 11.061.636.800,00	
5	Program PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp 8.479.589.540,00	Rp 8.047.083.540,00	
6	Program PROGRAM PENYELANGGARAAN JALAN	Rp 46.291.030.019,00	Rp 43.250.407.519,00	
7	Program PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 1.291.062.520,00	Rp 1.204.549.820,00	
8	Program PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 6.722.757.900,00	Rp 450.336.400,00	
9	Program Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Rp 511.477.360,00	Rp 426.477.360,00	
10	Program Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absen/ce	Rp 81.883.340,00	Rp 81.883.340,00	
11	Program Program penatungunan tanah	Rp 65.892.500,00	Rp 65.892.500,00	
	JUMLAH	Rp 86.663.986.186,00	Rp 83.394.052.683	

Mengetahui,
 Pejabat Aiaaan Langung
 WALL KOTA

 SAIFULLAH YUSUP

Pasuruan, 2 Oktober 2023
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG

 GUSTAP PURWOKO, ST, MT
 NIP. 196708241998031005

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUSTAP PURWOKO, ST, MT
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,
WALI KOTA

SAIFULLAH YUSUF

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

GUSTAP PURWOKO, ST, MT
NIP. 196708241998031005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II**

NAMA : GUSTAP PURWOKO, ST, MT
 NIP : 196708241998031005
 PANGKAT / GOL. : PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
 JABATAN / KELAS JABATAN : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG / 14
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		KETERANGAN
			Sebelum	Sesudah	
1	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	78	78	
2	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100	100	
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100	100	
4	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79.18	79.18	
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Jalan	77.5	77.5	
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Layanan Drainase	82.46	82.46	
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	61.51	61.51	
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Penataan Ruang	74.47	74.47	

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Sesudah	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.754.508.107,00	Rp 8.987.093.904,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 5.836.583.100,00	Rp 4.962.632.400,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Rp 3.264.543.500,00	Rp 2.816.187.100,00	

DRAINASE			
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp	11.414.658.300,00
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp	8.475.589.540,00
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	46.291.030.019,00
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp	1.291.062.520,00
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp	672.757.900,00
9	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp	511.477.360,00
10	PROGRAM PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Rp	81.883.340,00
11	PROGRAM PROGRAM PENATAGUNAN TANAH	Rp	65.892.500,00
JUMLAH		Rp	86.663.986.186,00
		Rp	11.061.636.800,00
		Rp	8.047.083.540,00
		Rp	45.250.407.519,00
		Rp	1.204.549.820,00
		Rp	450.208.400,00
		Rp	426.477.360,00
		Rp	81.883.340,00
		Rp	65.892.500,00
		Rp	82.279.799.483,00

Mengetahui,
 Pejabat Atasan Langsung
 WALI KOTA

SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 2 Oktober 2023
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG

GUSTAF PURWOKO, ST, MT
 NIP. 196708241998031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA : GUSTAP PURWOKO, ST., MT
 NIP : 196708241998031005
 PANGKAT / GOL. : PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
 JABATAN / KELAS JABATAN : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG / 14
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME												JML	%	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			Target
1	Meningkatnya kinerja unit kerja yang baik dalam pelaksanaan prima	Nilai SKUP-SKUP	Nilai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
2	Meningkatnya kinerja unit kerja yang baik dalam pelaksanaan prima	Perentase terwujud anggaran yang ditindaklanjuti	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Meningkatnya kinerja unit kerja yang baik dalam pelaksanaan prima	Perentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program SKUP	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Instruktur Kosa Perundang-undangan ekonomi dan sosial	Indeks Instruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks	0	0	78,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,18	79,18
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Instruktur Kosa Perundang-undangan ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Jalan	%	75,71	0	75,93	76,03	76,14	76,25	76,35	76,46	76,56	76,67	77,39	77,5	77,5	77,5	77,5
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Instruktur Kosa Perundang-undangan ekonomi dan sosial	Indeks Layanan Pemisahan	%	82,17	82,19	82,22	82,24	82,27	82,3	82,32	82,36	82,38	82,41	82,43	82,46	82,46	82,46	82,46
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Instruktur Kosa Perundang-undangan ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	%	0	0	59,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,51
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Instruktur Kosa Perundang-undangan ekonomi dan sosial	Indeks Penataan Ruang	%	0	0	86,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,47
% CAPAIAN KINERJA TIAP BILAN																		

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Seudah	
1	Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 8.754.508.107,00	Rp 8.987.093.904,00	
2	Program PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 5.836.583.100,00	Rp 4.962.632.400,00	
3	Program PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 3.264.543.500,00	Rp 2.816.187.100,00	
4	Program PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 11.414.658.300,00	Rp 11.061.636.800,00	
5	Program PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp 8.479.589.540,00	Rp 8.047.083.540,00	
6	Program PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 46.291.030.019,00	Rp 43.250.407.519,00	
7	Program PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 1.291.062.520,00	Rp 1.204.549.820,00	
8	Program PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 672.757.900,00	Rp 450.208.400,00	
9	Program Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Rp 511.477.360,00	Rp 426.477.360,00	
10	Program Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	Rp 81.883.340,00	Rp 81.883.340,00	
11	Program Program pemanfaatan tanah	Rp 65.892.500,00	Rp 65.892.500,00	
	JUMLAH	Rp 86.663.986.186,00	Rp 83.354.052.683	

Mengetahui,
Pejabat Asaan Langsung
WALI KOTA

SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 2 Oktober 2023
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

GUSTAF PURWOKO, ST, MT
NIP. 196708241998031005

Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

Diisi matriks Renstra Nama Perangkat Daerah Nama Daerah selama 5 tahun

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur	72,00%	73,05%	74,35%	75,80%	76,95%
2	Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Jalan	73,28%	77,50 %	79,32%	81,32%	83,62%
		Indeks Layanan Drainase	82,14%	82,46%	82,78%	83,10%	83,42%
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59,93%	61,51%	63,09%	64,67%	66,25%
		Indeks Penataan Ruang	69,40%	74,47%	84,55%	89,64%	94,75%